POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adinugraha, Anggiana G. dkk (eds), *Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat)*, Forci Development Fakultas Kehutanan IPB, Juli 2018, Bogor,

Anonim, *Penetapan Kawasan Hutan Menuju Kawasan Hutan Indonesia yang Mantap*, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Jakarta Juli 2017

Anonim, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta 2015

Apeldorn, LJ. Van, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1983

Awang, San Afri, *Dekonstruksi Sosial Forestri: reposisi masyarakat dan keadilan sosial*, BIGRAF Publishing-Yogyakarta, 2004

Departemen Kehutanan dan BPS, *Identifikasi Desa di Dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan 2009*, Depertemen Kehutanan dan BPS, Jakarta, 2009

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009*, FWI, Bogor, 2011

Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Edisi ke-VIII, *Yogyakarta*, 2005

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya (Hukum Tanah Nasional)*, Jilid 1, Djambatan, Bandung, 2005

Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Iskandar, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan, dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Program Parcasarjana Univeristas Padjajaran, Bandung 2011

Ismail, Nurhasan, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018

Kartodihardjo, Hariadi, *Analisis Kebijakan Pengelolaan SDA (diskursus-politik-aktor-jaringan)*, Sajogyo Intitute, Yayasan Auriga, Rimbawan Muda Indonesia, Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah-IPB, Pusat Studi Agraria-IPB, dan Firdaus Pressindo, Bogor, 2017

Kartodihardjo. Hariadi, Bramasto Nugroho dan Haryanto R Putro, *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): konsep, peraturan perundangan dan implementasi*, Kementerian Kehutanan (Dirjen Planologi Kehutanan-Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan), Jakarta, 2011

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008

……, *Pengantar Teori Hukum (terj)*, Nusa Media, Bandung, 2012

Kementerian Kehutanan, *Statistik Kementerian Kehutanan 2013*, Kementerian Kehutanan, Jakarta, Juli 2014

Latif, Abdul., Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2014

Mahfud MD, Moh, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

Maryudi, Ahmad, *Rejim Politik Kehutanan Internasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005

……, *Metode Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996

Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1984

Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Cetakan ke-2, Yogyakarta, 2015

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nurlinda, Ida, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Menurut Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kebijakan Pertanahan Nasional*, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008

Pamulardi, Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Peluso, Nancy L, *Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa, (terj)*, Konphalindo, Jakarta, 2006

Peirce, Carol J. dan Doris Capistrano (eds), *Politik Desentralisasi: Hutan, Kekuasaan dan Rakyat (pengalaman di berbagai negara)*, CIFOR-Bogor, 2006

Purwanto. Agus Budi dan Edi Suparapto, *Hutan Jawa: kontestasi dan kolaborasi*, BP ARuPA-Yogyakarta, 2013

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-VIII, 2014

Rawl, John, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (terj)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Simon, Hasanu, *Hutan Jati dan Kemakmuran (problema dan strategi pemecahannya)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Sirait, Martua T, *Inklusi, Ekslusi dan Perubahan Agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Pres, Yogyakarta, 2017

Sumardjono, Maria S.W, dkk. *Kajian Harmonisasi Undang-undang di Bidang SDA dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan KPK, Jakarta, 2018

Sumardjono, Maria SW, dkk, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: antara yang tersurat dan tersirat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

……..... *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2018

…….. *Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil atas Sumber Daya Alam*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

……., *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (materi kuliah)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

……..,"*Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian"*, makalah Seminar Metodologi Penelitian bagi Dosen FH UGM, Yogyakarta, 12 April 1989

Safitri, M.A, *Forest tenure in Indonesia: the socio-legal challenges of securing communities'rights*, Doctoral thesis, Leiden University, 2010

Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, cetakan kedua, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960

Wahjono, Padmo, *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Wibowo, Eddi, *Penguatan Civil Society melalui Proses Perubahan Kebijakan Publik di Tingkat Lokal (studi kasus munculnya perda PSDHBM di Kabupaten Wonosobo)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004

Wulan, Yulia Cahya dkk, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Center for International Forestry Research, Bogor, 2004

Zakaria, Yando. dkk, *Perhutanan Sosial: dari Slogan menjadi Program (naskah akademik reformulasi kebijakan perhutanan sosial)*, Sekretariat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Jakarta, 2018

Yusmira, Nova, *Politik Hukum Perubahan Kawasan Hutan dalam Upaya Menyelesaikan Perbedaan Peruntukan Ruang di Kawasan Hutan*, Program Studi S2 Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013

Jurnal:

Agrawal, Arun. dan Elinor Ostrom, "Collective Action, Property Rights, and Decentralization in Resource Use in India and Nepal", POLITICs & SOCIETY, Vol. 29 No. 4, December 2001, Sage Publications

Arizona, Yance, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal konstitusi, Volume 8, nomor 3, Juni 2011

Basyar, A. Hakim, "Tap MPR-RI No. IX/MPR-RI/2001: Upaya Meletakkan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Komprehensif", Majalah Perencanaan Pembangunan No. 27, April-Juni 2002

Diantoro, Totok Dwi, "Quo Vadis Hutan Jawa", dalam *Rekonfigurasi Pengelolaan Hutan Jawa*, Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif 25/XIII, Insist Press, Yogyakarta, 2011

Hendarto. Kresno Agus, "Perhutanan Sosial dan Peubah-peubah Sosiologi yang Harus Diperhatikan: sebuah tinjauan teoritis", Jurnal Managemen Hutan Tropika Vol. IX No. 1, 2008

Magnar, Kuntana., Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik, "Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: (studi atas putusan MK mengenai judicial review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)", Jurnal Konstitusi, Volume 7, No. 1, Februari 2010

Maladi, Yanis, "Kajian Hukum Kritis Alih Fungsi Lahan Hutan Berorientasi Kapitalis", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1 Januari 2013, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto

Muhajir, Mumu, "Satu Tahun Perber 4 Menteri tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan: kendala, capaian, dan arah ke depan", Policy Brief Vol. 02/2015, Epsitema Institute-Jakarta

Nurkhalis, "Teori Konstruksi Paradigma Thomas S. Kuhn", Jurnal Ilmiah Islam Futura, sumber: file:///C:/Users/asus%20netbook/Downloads/55-79-1-PB.pdf diakses pada tanggal 20 Mei 2017

Nurjaya, Nyoman, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia," Jurnal Jurisprudence Vol. 2 No. 1 Maret 2005

Nurcholis, Hanif, "Perkembangan Negara/Administrasi Publik Terkini: teori, riset dan praktik", makalah disampaikan di Fisip Universitas Jember, 14 November 2017

Ostrom, Elinor. dan Edella Schlager, "Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis", Land Economic, Vol. 68, No. 3 (August., 1992), University of Wisconsin Press

Peluso, Nancy L and Peter Vendergeest, "Genealogis of Political Forests and Costumary Rights in Indonesia, Malaysia and Thailand", The Journal of Asian Studies, Vol. 60, No. 3 (Aug., 2001), Association for Asian Studies

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Laporan Penelitian, Makalah, Prosiding:

Anonim, "Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan," Prosiding Semiloka (*integrated white paper*), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012

Djajono, Ali, "Saatnya KPH Bergerak (kembali)", AgroIndonesia 24 Juli 2018, sumber: http://agroindonesia.co.id/2018/07/saatnya-kph-bergerak-kembali/ diakses pada tanggal 23 Januari 2019

Fay, Chip dan Martua Sirait, "Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia: mempertanyakan sistem ganda atas pengausaan tanah", dalam Anonim, *Tanah Masih di Langit (penyelesaian masalah penguasaan tanah dan kekayaan alam di Indonesia yang tak kunjung tuntas di era reformasi)*, Prosiding Seminar Nasional 11-13 Oktober 2004, Yayasan Kemala-Jakarta

Hendarto, "Perhutanan Sosial dan Peubah-peubah Sosiologi yang Harus Diperhatikan: sebuah tinjauan teoritis", Jurnal Managemen Hutan Tropika Vol. IX No. 1, 2008

Ismail, Nurhasan dkk, "Analisa dan Evaluasi Hukum atas UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan" (laporan akhir), Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 2011

Kartodihardjo, Hariadi, "Kertas Posisi RUU SDA", bahan diskusi oleh Pokja PA-PSDA, Bappenas dan KLH, Jakarta, 8 Desember 2006

……"Diskursus dan Kebijakan Institusi-Politik Kawasan Hutan: menelusuri studi kebijakan dan gerakan sosial SDA di Indonesia", Orasi Ilmiah Guru Besar IPB, Bogor, 13 Februari 2016

……., "Titik Kritis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan", Opini Warta Online Agroindonesia, 5 Desember 2017. Sumber: http://agroindonesia.co.id/2017/12/titik-kritis-penyelesaian-penguasaan-tanah-dalam-kawasan-hutan-2/ diakses pada tanggal 20 Juni 2018

Mochtar, Zainal Arifin dkk, "Analisis Komparasi Sifat Mengikat Putusan *Judicial Review* pada Peradilan Tata Negara (Mahkamah Konstitusi) dan Peradilan Tata Usaha Negara", Laporan Penelitian di Fakultas Hukum UGM, Mei 2007, tidak diterbitkan

Muhajir, Mumu. Dian Yanuardi, dkk. "Pembaruan Penguasaan dan Pengelolaan Kehutanan (Tenurial Reform) di Tangan KPK", draf belum diterbitkan. Sumber:http://kawalnkb.info/wp-

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

content/uploads/2016/06/Evaluasi-GN-PSDA-draft.pdf diakses pada tanggal 1 Juni 2019

Nugroho, Yuli Prasetyo, "Perhutanan Sosial", materi presentasi disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Program Magister Hukum Litigasi kerjasama dengan Kementerian LHK, Yogyakarta 26 April 2018

Sembiring, Sembiring, "Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara dalam Sistem Hukum Tanah Nasional", Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum FH UGM, 2016

Suhendang, Endang, "Perkembangan Paradigma Kehutanan," makalah dalam Diskusi *Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem sebagai Pendekatan untuk Pengelolaan Hutan Indonesia dalam Paradigma Kehutanan Indonesia Baru* (dalam rangka ulang tahun emas Fakultas Kehutanan IPB: 1963-2013), Bogor, Agustus 2013. Sumber: http://fahutan.ipb.ac.id/en/component/attachments/download/62 diakses pada tanggal 20 Mei 2017

Sumardjono, Maria S.W.,"UUPA, Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai", makalah disampaikan dalam "*Pembekalan dan Ujian Kode Etik Profesi bagi Para Calon PPAT*", diselenggarakan oleh PP IPPAT, Jakarta, 19 September 2012

Safitri, Myrna, "Mencari Perusak Hutan", Opini Harian Kompas, 12 Maret 2015

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, "Perubahan Kebijakan dalam Pengukuhan Kawasan Hutan", Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Jakarta 4 September 2014. Sumber: http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/81620140925164524_240531244-perubahan-kebijakan-dalam-pengukuhan-kawasan-hutan.pdf diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Tim Pakar Fakultas Kehutanan UGM, "Pokok-Pokok Pikiran UGM untuk Revisi UU 41/1999", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "*Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*", Fakultas Kehutanan UGM, 12 April 2017

Tim Pelaksana Penyelesaian PTKH, "Sosialisasi Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian PTKH", materi presentasi 2017, tidak dipublikasikan

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wibowo, Agung dkk, "Dari Reformasi Kembali ke Orde Baru: tinjauan kritis Perpres No. 88 Tahun 2017", Opini Hukum AMAN, Epistema Institute, dan Perkumpulan HuMA Oktober 2017. Sumber: http://epistema.or.id/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/10/Opini_Hukum-Okt_2017.pdf diakses pada tanggal 18 Juni 2018

W, Soeparno, "Menyoal Luas Kawasan Hutan Minimal 30%?", sumber: https://indonesiana.tempo.co/read/121378/2018/01/05/soeparno_w/menyoal-luas-kawasan-hutan-minimal-30 diakses pada tanggal 5 Januari 2019

Internet:

Anonim, "Naskah Akademik RUU Pertanahan", dikutip dari sumber http://bapka.usu.ac.id/peraturan-rektor/category/9-peraturan-lainnya.html?download=60%3Aruu-naskah-akademik-. diakses pada tanggal 15 September 2015

Anonim, *"Penyelesaian Konflik Agraria Wajib jadi Prioritas Jokowi-JK"*. Siaran Pers Komnas HAM, KPA, dan Walhi 9 September 2014. Sumber: http://www.walhi.or.id/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi-prioritas-jokowi-jk.html diakses pada tanggal 9 Desember 2016.

Anonim, "Data Pelepasan Kawasan Hutan periode Tahun 2004-2016", Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber: http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/02/Data-Pelepasan-Kawasan-Hutan.pdf diakses pada tanggal 18 Juli 2017

Anonim, "UGM Tawarkan Rekomendasi Atasi Polemik Tanaman Sawit di Kawasan Hutan", Pers Conference Fakultas Kehutanan UGM 19 Oktober 2018. Sumber: https://ugm.ac.id/id/news/17239-ugm.tawarkan.rekomendasi.atasi.polemik.tanaman.sawit.di.kawasan.hutan diakses pada tanggal 16 Desember 2018

Anonim, "Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan," Prosiding Semiloka (*integrated white paper*), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012. Sumber: http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15308/integrated-working-paper-inisiatif-percepatan-pengukuhan-kawasan-hutan.pdf/a5c992d5-22f4-494c-8f9d-492b122f018e diakses pada tanggal 9 Desember 2016

Anonim, "Sulitnya Merealisasikan Pasal 33 UUD 1945 ('Jihad Konstitusi' sebagai salah satu jalan untuk meluruskan UU yang bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusi)", hukumonline.com, 11

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mei 2015. Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55505f23aac65/sulitnya-merealisasikan-pasal-33-uud-1945 diakses pada tanggal 20 Desember 2017

Anonim, Ringkasan Putusan Perkara No. 058,059,060,063/PUU-II/2004 dan No. 008/*PUU*-III/2005, sumber: http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/PUU%2058-59-60-63%202004%2008-2005%20SDA.pdf diakses 20 Desember 2017

Anonim, "Seluruh UU Sumber Daya Air Dibatalkan MK", sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10634 diakses pada tanggal 20 Desember 2017

Anonim, "Tarif PNBP Kawasan Hutan Masih Bisa Ditelaah", Kompas 22 Februari 2008. Sumber: https://travel.kompas.com/read/2008/02/22/15285581/tarif.pnbp.kawasan.hutan.masih.bisa.ditelaah diakses pada tanggal 20 Desember 2017

Anonim, "Siaran Pers Hasil Kajian KPK tentang Kehutanan", sumber: http://jikalahari.or.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=132:siaran-pers--paparan-hasil-kajian-kpk-tentang-kehutanan&catid=37:forest-news&Itemid=132&lang=en diakses pada tanggal 17 Mei 2018

Anonim, Paparan KPK dalam *Kick Off Meeting* Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia (Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Sektor Kehutanan dan Perkebunan di 24 Provinsi), KPK, 17 Februari 2015. Sumber: https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/gn-sda-kehutanan/02-150216-PAPARAN-KPK-GN-SDA-HUTBUN.pdf diakses pada tanggal 17 Mei 2017

Anonim, "NKB 12 Kementerian dan Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan", 11 Juni 2013, sumber: http://www.dkn.or.id/2013/07/11/nkb-12-kementerian-dan-lembaga-tentang-percepatan-pengukuhan-kawasan-hutan-indonesia/ diakses pada tanggal 17 Mei 2018

Anonim, Naskah Kebijakan DKN terkait NKB 12 Kementerian dan Lembaga, "Penataan Kawasan Hutan bagi Kebangkitan Kehutanan Nasional (Masalah, Kebijakan dan Peran DKN)", DKN, Jakarta, Cetakan Pertama Oktober 2013. Sumber: http://dkn.or.id/wp-content/uploads/2014/01/Naskah-Kebijakan-12-KL_bahasa.pdf diakses pada tanggal 17 Mei 2018

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Anonim, Evaluasi GNP-SDA 2018, https://acch.kpk.go.id/id/evaluasi-gnp-sda-2018 diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Anonim, "Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2015-2019", Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan-Kementerian LHK, Desember 2015, hlm. 9-10. Sumber: http://pktl.menlhk.go.id/asset/action.php?action=openfile&filename=20180109072535.pdf diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Anonim, "Matriks Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA-Sektor Kehutanan dan Perkebunan 2015-1. Kementerian LHK", sumber: https://acch.kpk.go.id/id/gn-sda-kehutanan diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Anonim, "Implementasi Renaksi NKB 12 K/L Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan", Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Jakarta 17 Maret 2016. Sumber: https://slideplayer.info/slide/12099058/ diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Kantor Berita Nusantara, "Petani Satumin Dituntut 3 Tahun Penjara", 27 September 2018. Sumber: https://kbr.id/nusantara/09-2018/petani_satumin_dituntut_3_tahun_penjara/97467.html diakses pada tanggal 20 Juni 2019

Mongabay, "Akhirnya Tiga Petani Soppeng Divonis Bebas", 28 Maret 2018. Sumber: https://www.mongabay.co.id/2018/03/28/akhirnya-tiga-petani-soppeng-divonis-bebas-bagaimana-ceritanya/ diakses pada tanggal 20 Juni 2019.

Ekuatorial.com, "Mekanisme PPH untuk Keadilan Penetapan Hak atas Huta", 28 Agustus 2014. Sumber: https://www.ekuatorial.com/id/2014/08/indonesian-mekanisme-pph-untuk-keadilan-penetapan-hak-atas-hutan/#!/map=4847 diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Mongabay.com, "Kementerian Lingkungan Rilis Peta Indikatif Hutan Adat dan Ubah Aturan", 29 Mei 2019. Sumber: https://www.mongabay.co.id/2019/05/29/kementerian-lingkungan-rilis-peta-indikatif-hutan-adat-dan-ubah-aturan/ diakses pada 30 Juni 2019

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mongabay, "Izin Kebun Sawit di Buol Bermasalah, Mengapa Pelepasan Kawasan Hutan Tetap Keluar?" 31 Januari 2019. Sumber: https://www.mongabay.co.id/2019/01/31/izin-kebun-sawit-di-buol-bermasalah-mengapa-pelepasan-kawasan-hutan-tetap-keluar/ diakses pada tanggal 30 Juni 2019

Bisnis.com, "KLHK Sebut Administrasi Izin 9.964ha Kebun Sawit di Buol Sudah Lengkap", 21 Januari 2019. Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20190121/99/880899/klhk-sebut-administrasi-izin-9.964-ha-kebun-sawit-di-buol-sudah-lengkap diakses pada tanggal 30 Juni 2019

http://www.merdeka.com/uang/tahun-lalu-115-ribu-hektar-hutan-perhutani-dalam-sengketa.html diakses pada tanggal 9 Desember 2016

http://kbbi.web.id/paradigma, diakses pada tanggal 20 Mei 2017

http://www.webster-dictionary.org/definition/Paradigm, diakses pada tanggal 20 Mei 2017

https://kbbi.web.id/kawasan diakses pada tanggal 18 Juni 2017

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kawasan/ diakses pada tanggal 18 Juni 2017

http://industri.bisnis.com/read/20180523/99/798990/reforma-agraria-977.824-ha-kawasan-hutan-telah-dilepas diakses pada tanggal 17 Juni 2018

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

UUD Negara RI 1945

Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Hutan

PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.

PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan

PP No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Surat Edaran Menteri Kehutanan SE.3/Menhut-II/2012 tentang Putusan MK 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012

Surat Edaran Menteri Kehutanan SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SE.2/Menlhk/Setjen/kum.4/2/2016 tentang Putusan MK 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015

Nota Kesepakatan Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga (NKB 12 K/L) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Planologi Kehutanan untuk Atas Nama Menteri Kehutanan Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Kawasan Hutan

Surat Keputusan Menteri LHK No. 180/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria

Surat Keputusan Menteri LHK No. 22/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

Peraturan Menteri LHK P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri LHK P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani Peraturan Menteri LHK P.32/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN—No. 79 Tahun 2014, P.B 3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, dan 8/SKB/X/2014—(Perber 4 Menteri) tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri LHK P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria

Peraturan Menteri LHK P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria

Peraturan Menteri LHK P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Surat Keputusan Menteri LHK 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat

Surat Edaran Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung No. 114/PDASHL/KPHL/DAS-3/9/2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Budidaya Kopi di Hutan Lindung

Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010 terkait uji permohonan materiil UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan MK Perkara No. 21-22/PUU-V/2007 terkait uji permohonan materiil UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Putusan MK Perkara No. 3/PUU-VIII/2010 terkait permohonan uji materiil UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Putusan MK No. 85/PUU-XII/2013 terkait permohonan uji materiil UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 terkait permohonan uji materiil UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 terkait permohonan uji materiil UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait permohonan uji materiil UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 terkait permohonan uji materiil UU No. 41 tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentan Pencegahan Pemberantasan Pembalakan Hutan

Putusan PN Palembang No.1150/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 1149/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 1159/Pid.Sus/2014/PN.Plg; dan 1158/Pid.Sus/2014/PN.Plg terkait perkara kriminalisasi petani (anggota marga) di kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Putusan PN Kendal No.29/Pid.Sus/2016/PN.Kdl *juncto* Putusan PT Semarang Perkara No.43/Pid.Sus/2017/PT.Smg terkait perkara kriminalisasi petani hutan yang dituduh kawasan hutan (hasil tukar-menukar dengan lahan non-kawasan) tanpa izin di Desa Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah

Putusan PN Blora No.288/Pid.Sus/2017/PN.Bla *juncto* Putusan PT Semarang Perkara No.102/Pid.Sus/2018/PT.Smg terkait perkara kriminalisasi petani hutan yang memasuki kawasan hutan (Perum Perhutani) dan mengambil ranting tanpa izin di Desa Temulus, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA PUTUSAN MK TERKAIT UJI MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si;
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Putusan MA No. 56/P/HUM/2017 terkait permohonan uji materiil P.39/Menlhk/Setjen/Kum.I/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani